



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju Telp. (0426)-2325088 Fax. (0426)-2325088.

Email : [kanwilsulbar@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsulbar@kemenkumham.go.id) Laman : <https://sulbar.kemenkumham.go.id>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Survei Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat atas Layanan Internal yang dilaksanakan Oleh Divisi Administrasi	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	83	Menghitung indeks penyelenggaraan Masyarakatan di wilayah adalah dengan menjumlahkan nilai dari setiap variable Penyelenggaraan Masyarakatan di bagi dengan jumlah variable dikali 100% $indeks = \frac{(A+B+C+D+E+F+G+H+I)}{9} \times 100\%$ A : Nilai Indeks Keamanan di Wilayah B : Nilai Indeks Derajat Parameter Kesehatan di Wilayah C : Nilai Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah D : Nilai Indeks Pengelolaan Basan dan Baran E : Nilai Indeks Pembinaan Narapidana di Wilayah F : Nilai Indeks Pengetasan Anak di Wilayah G : Nilai Indeks Pembimbingan di Wilayah H : Nilai Indeks Kerjasama Masyarakatan di Wilayah	Kepala Divisi Masyarakatan	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
				I : Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan di Wilayah		
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>85%</p> <p>95%</p> <p>98%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%</p> <p>Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%</p> <p>Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.</p> <p>Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.</p> <p>Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%</p>	<p>Kepala Divisi Masyarakatan</p> <p>Kepala Divisi Masyarakatan</p> <p>Kepala Divisi Masyarakatan</p> <p>Kepala Divisi Masyarakatan</p> <p>Kepala Divisi Masyarakatan</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p> <p>Kepala Kantor Wilayah</p> <p>Kepala Kantor Wilayah</p> <p>Kepala Kantor Wilayah</p> <p>Kepala Kantor Wilayah</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ $A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	100%	Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	19%	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%	Menghitung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran X 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100%	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hokum tetap) dikali 100%.	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
8.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan	70%	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
	pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	pekerjaan di luar lembaga				
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
9.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
10.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4.00	Kepala Divisi Keimigrasi	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00-4.00	Kepala Divisi Keimigrasi	Kepala Kantor Wilayah
11.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Jumlah PNPB tahun berjalan dikurang jumlah PNPB tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNPB tahun sebelumnya, dikali 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
12.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
13.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Indeks Penegakan Kekayaan Intelektual terdiri atas beberapa komponen yang diformulasikan menjadi indeks. Komponen terdiri atas: 1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual = jumlah aduan pelanggaran KI yang ditangani di tahun berjalan dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk di tahun berjalan dikali 100% 2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara optimal = jumlah penyelesaian aduan sengketa KI baik melalui penanganan perkara maupun mediasi yang ditangani di tahun berjalan dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran KI dan permohonan mediasi yang masuk di tahun berjalan dikali 100% 3. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI = jumlah peserta edukasi yang memperoleh	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pemahaman pencegahan pelanggaran HKI dibagi jumlah peserta dikali 100%</p> <p>Persentase Komponen Indeks = (PAP+PS+EPP) / 3</p> $\text{Indeks} = \frac{\text{Persentase Komponen Indeks}}{20} - 1$		
14.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	<p>1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah</p> <p>2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah</p>	<p>70%</p> <p>17%</p>	<p>Jumlah masyarakat yang memahami KI dibagi total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di kalikan 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual tahun berjalan dikurang jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual tahun sebelumnya, dibagi jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual tahun sebelumnya, dikalikan 100 %</p>	<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p> <p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>	<p>Kepala Kantor Wilayah</p> <p>Kepala Kantor Wilayah</p>
15.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi dengan permohonan dikalikan 100 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
16.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	13 Orang	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
17.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
18.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
19.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
20.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Jumlah anggota JDIHN yang dikelola dibagi total anggota JDIHN dikalikan 100 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
21.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	Jumlah layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan dibagi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi dikalikan 100 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	Jumlah layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan dibagi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi dikalikan 100 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
22.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	Jumlah peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan dibagi total usulan dikalikan 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah
23.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	$\frac{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}} \times 100$	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah